

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Organisasi di tingkat pusat maupun di tingkat daerah harus mempunyai sistem informasi akuntansi yang memadai untuk berdaya saing. Menurut Mulyadi (dalam Clarisha Riezky Amalia 2016) sistem informasi akuntansi (SIA) adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem informasi akuntansi dapat dilakukan baik dengan cara manual ataupun melalui sistem terkomputerisasi. Namun, sistem pencatatan manual sudah jarang bahkan tidak digunakan karena sekarang sudah ada sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan otomatis untuk sistem pelaporan maupun pencatatannya sudah sesuai dengan prosedur, sehingga laporan keuangan lebih mudah dilakukan selain itu pembuatan laporan akan lebih efektif dan efisien.

SIA yang baik harus memiliki keamanan, kerahasiaan, privasi, integritas pemrosesan, dan ketersediaan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, perusahaan maupun lembaga keuangan dapat melakukan proses operasi maupun informasi dengan lebih efektif dan efisien, karena adanya pengendalian yang mengendalikan proses-proses tersebut sehingga hasilnya yang dicapai dapat sesuai dengan tujuan perusahaan maupun lembaga keuangan. Informasi akuntansi yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi dapat dipertanggungjawabkan untuk kelak digunakan dalam hal pengambilan keputusan mengenai keuangan perusahaan maupun digunakan oleh pihak luar perusahaan.

Baik buruknya kinerja pada sistem informasi dapat dilihat dari kepuasan pemakai SIA. Dapat dibayangkan apabila suatu sistem informasi dalam perusahaan tidak berjalan dengan baik, misalnya karena suatu komponen di dalam sistem yang tidak bekerja dengan optimal, tentu hal ini akan menyebabkan sistem yang berjalan menjadi terhambat sehingga

mengakibatkan kegiatan di dalam perusahaan tidak berjalan dengan lancar, informasi yang dihasilkan juga tidak akurat.

Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui dana desa, maka pemerintah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan beserta Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti dengan mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Siskeudes merupakan suatu aplikasi yang digunakan desa dalam proses penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan desa. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa sehingga mampu mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima oleh desa serta tidak menimbulkan kekhawatiran mengenai kesiapan desa dalam mengelola dana yang diterimanya. Siskeudes sebagai aplikasi pengelolaan keuangan sangat berperan dalam memproses data input dan menghasilkan *output*.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2022, dana desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Tercatat alokasi dana desa tahun 2015 sebesar Rp 20,77 triliun, sementara pada tahun 2021 alokasi dana desa sebesar Rp 72 triliun artinya meningkat sebesar 3,5 kali lipat dibanding dengan tahun 2015. Total dana desa sampai dengan tahun 2022 mencapai Rp 468,9 triliun. Perolehan dana desa per desa di seluruh Indonesia meningkat sebesar 3,4 kali lipat dari tahun 2015 sebesar Rp 280,27 juta per desa menjadi Rp 960,5 juta per desa.

Semua desa yang tersebar di Provinsi Bali sudah mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Namun, di beberapa desa masih terdapat kendala dalam mengimplementasikan Siskeudes, seperti kondisi Sumber Daya Manusia yang belum memadai, dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya yang belum memadai, serta belum kritisnya masyarakat mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga bisa menjadi peluang bagi aparat pemerintah desa untuk berbuat kecurangan. Kemampuan pemerintah desa dalam mengatasi masalah-masalah tersebut tentu berbeda-beda, namun secara umum upaya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut yakni dengan melakukan perombakan pegawai

sehingga khusus dibagian keuangan beranggotakan pegawai yang masih muda dan juga telah dilengkapi sarana dan prasarana yang mendukung.

Menurut Lilik Setiawati, dkk (2022) dalam penelitiannya mengenai Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Pelatihan, Serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Studi Pada Desa di Distrik Prafi Kabupaten Manokwari) menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan SISKEUDES di Distrik Prafi, serta peran pendamping desa berpengaruh positif terhadap efektivitas penggunaan SISKEUDES di Distrik Prafi. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan BPKP mengenai kendala-kendala yang dialami desa, meliputi kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai serta sarana yang kurang mendukung.

Pada awal tahun 2017, pemerintah mewajibkan seluruh desa agar menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam penyusunan laporan keuangan yang menyebabkan beberapa desa mengalami kendala termasuk Desa Bila. Berdasarkan observasi awal, Ibu Ni Made Suyatni sebagai salah satu pegawai di Kantor Desa Bila mengatakan bahwa ada beberapa kendala-kendala yang dialami selama mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa, seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam mengoperasikan Siskeudes. Di Kantor Desa Bila yang seharusnya mengoperasikan Siskeudes ini adalah Kaur Keuangan, tetapi karena kondisi SDM dari segi umur maupun pendidikan mengalihkan Sistem Keuangan Desa ini ke orang lain. Pada prinsipnya sistem keuangan yang seharusnya dipegang penuh dan yang memiliki wewenang hanya satu orang yang dapat mengoperasikan sistem keuangan agar tidak menimbulkan kecurangan. Ibu Ni Made Suyatni juga mengatakan sarana yang kurang mendukung, sehingga dalam mengaplikasikan Siskeudes sering tidak terdeteksi dan mengalami *server error* pada saat jam kerja.

Berdasarkan wawancara awal, diketahui bahwa pengimplementasian Sistem Keuangan Desa di Desa Bila belum memadai, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai hal-hal apa saja yang terjadi di dalam pengimplementasian Sistem Keuangan Desa dan dianggap perlu untuk

mengungkap bagaimana “Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Upaya Mendukung Transparansi Pengelolaan Keuangan di Desa Bila”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diketahui identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi baru yang diterapkan di Desa Bila sejak awal 2017, sehingga dalam pengimplementasiannya mengalami beberapa kendala.
2. *Server error* di saat jam kerja serta keterbatasan Sumber Daya Manusia, dimana dalam hal ini Bendahara kurang pelatihan dalam mengoperasikan Sistem Keuangan Desa.
3. Pembagian wewenang, dalam mengoperasikan sistem keuangan yang seharusnya dipegang penuh dan yang memiliki wewenang hanya satu orang namun dialihkan ke orang lain.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan, maka dalam hal ini peneliti membatasi penelitian yang berkaitan dengan pengimplementasian Sistem Keuangan Desa dalam upaya mendukung transparansi pengelolaan keuangan di Desa Bila.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Sistem Keuangan Desa dalam upaya mendukung transparansi pengelolaan keuangan di Desa Bila?
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Desa dalam mendukung transparansi pengelolaan keuangan di Desa Bila?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi Sistem Keuangan Desa dalam upaya mendukung transparansi pengelolaan keuangan di Desa Bila.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Desa dalam mendukung transparansi pengelolaan di Desa Bila.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, informasi, dan wawasan, serta memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana implementasi Sistem Keuangan Desa dalam upaya mendukung transparansi pengelolaan keuangan yang nantinya dapat dijadikan sebagai referensi atau pembanding pada penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat mempraktekkan teori yang selama ini didapat di bangku kuliah dengan keadaan dan permasalahan yang ada di lapangan dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Terapan Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Program Studi Diploma IV Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha.

- b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan bacaan yang dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

c. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan dan referensi serta mampu menjadi penggugah kesadaran dalam kehidupan masyarakat bahwa perlunya dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada organisasi sektor publik.

